

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.504 pulau, di mana luas wilayah teritorialnya 3,1 juta km<sup>2</sup> dan wilayah perairannya 5,8 juta km<sup>2</sup>. ( Marhaeni Ria Siombo, 2010 : 1). Topografi besar ini menyebabkan Indonesia memiliki zona yang bersentuhan dengan berbagai negara. Indonesia memiliki pinggir darat dengan Malaysia, Timur, dan Papua Nugini 3092,8 km. Kemudian, wilayah lautnya pinggir 10 negara khusus India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timur, Palau, dan Papua Nugini. Perbatasan Laut menggabungkan 92 pulau kecil yang mengemudi, pergi dari Pulau Miangas di utara ke Pulau Dana di selatan.

Dengan wilayah pinggir yang tak terhitung jumlahnya, Indonesia sangat ingin mempertahankan kekuasaan dari bahaya dari berbagai bangsa dan mengembangkan kehidupan kerabatnya di pinggir. Sebagai teras masuk, esensi pinggir Indonesia harus mencerminkan kondisi terlindung dan sejahtera. Meskipun demikian, pandangan dunia masa lalu yang melihat zona pinggir sebagai halaman dan zona terjauh membuat peningkatannya kurang dilihat oleh administrasi dan jaringan. Sentralistik Indonesia sekitar saat itu lebih mengkhawatirkan perbaikan lokal fokus. Dengan demikian, pengembangan wilayah pinggir sebagian besar jatuh di belakang wilayah Indonesia yang berbeda.

Keadaan zona pinggiran Indonesia yang mengganggu akan semakin jelas ketika kontras dengan wilayah pinggiran lain yang dikembangkan lebih lanjut dari berbagai negara. Dari tiga negara yang mengapit Indonesia, Malaysia dipandang semakin berkembang dalam menghadapi wilayah pinggirannya. Pinggiran darat Indonesia-Malaysia membentang 2.004 km di 16 sub-lokal di Kalimantan Barat dan 14 sub-wilayah di Kalimantan Timur. Ada dalam hal apapun tiga isu reguler yang muncul di zona pinggiran tanah ini. Untuk memulainya, masih ada 9 garis besar fokus (batas pemisah) yang belum kebobolan di antara Indonesia dan Malaysia di pinggiran darat, khususnya Tanjung Datu, D.400, Gunung Raya, Sungai Buan, Batu Aum, C500-C600, B2700-B3100, Sungai Semantipal, dan Sungai Sinapad. Kedua, beberapa bagian dari zona pinggiran RI-Malaysia adalah rumah bagi kesalahan lintas pinggiran, terutama individu yang membajak dan aset karakteristik. Wilayah miring yang mencolok menggabungkan Entikong-Tebedu, Badau-Lubok Antu, dan Sebatik-Tawau. Ketiga, laju keuangan masyarakat Indonesia di pinggiran umumnya rendah. Ketiga masalah normal ini adalah bahaya asli di wilayah pinggiran. ( Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2010 : 321 )

Untuk mengurus persoalan di atas, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menangani wilayah pinggiran darat dengan Malaysia. Pendekatan ini signifikan dengan alasan bahwa masalah ini dapat membawa hilangnya sway, pemecahan patriotisme penduduk pinggiran, pertukaran kewarganegaraan raksasa dari WNI ke WN Malaysia, ketegangan politik di antara bangsa-bangsa, dan yang paling luar biasa adalah perselisihan yang

mendorong pertempuran dua negara karena hampir terjadi dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1962.

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini memiliki semua earmark yang memberikan pertimbangan yang lebih tulus kepada wilayah pinggiran. Hal ini tercermin dari tergabungnya wilayah pinggiran sebagai salah satu Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014, di mana beberapa sub-lokale di zona pinggiran tanah Indonesia-Malaysia berubah menjadi kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Salah satu kegiatan kritis administrasi dalam administrasi zona pinggiran adalah fondasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Organisasi ini mengatur 18 kantor non-layanan / negara bagian dan perwakilan utama terdekat untuk merakit wilayah pinggiran. Oleh karena itu, masalah koordinasi antara kantor dan pembagian kekuasaan dapat menjadi semakin jelas wajib. Ada tiga metodologi yang digunakan BNPP dalam mengawasi wilayah Pinggiran, khususnya keamanan, bantuan pemerintah, dan metodologi ekologis.

Dalam pendekatan keamanan, strategi pemerintah selama beberapa waktu telah dijalankan, di mana TNI yang juga diingat untuk lingkaran koordinasi BNPP memainkan pekerjaan terbesar. TNI mewajibkan perlindungan keamanan dalam dua pengukuran, menjadi penjaga adat dan nontradisional/nonmiliter tertentu. Dalam perlindungan konvensional, TNI memperkenalkan dua tim, khususnya dengan membangun tiga pos

Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan (Gabma). Pos Gabma ini merupakan jenis partisipasi militer di antara Indonesia dan Malaysia dalam menjaga pinggiran mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa media melihat langkah batas, seperti yang ditunjukkan oleh penerimaan otoritas TNI itu tidak terjadi, dengan alasan bahwa titik tapal batas diselesaikan melalui arah, bukan jenis fisik tapal. Menyoal perlindungan nontradisional, TNI melakukan berbagai proyek yang membantu pemerintah membantu jaringan, misalnya program TNI Masuk Desa, mulai dari membantu membangun jalan akses menuju kota pinggiran yang jauh, hingga menggelar bhakti sosial sebagai obat gratis dan pemberian makanan. Selanjutnya, adalah normal bahwa jaringan merasa terbantu dan gambar TNI di pinggiran yang dipandang sebagai penghalang dapat dibubarkan.

Dalam pendekatan bantuan pemerintah, bagian dari pemerintah diperkenalkan dalam latihan BNPP. Mengingat konsekuensi dari pertemuan dengan Deputi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Potensial BNPP ( Wuryandari, 2009 : 43 ), strategi pusat menangani wilayah pinggiran adalah sebagai berikut:

- 1) mempersingkat upaya keamanan dan kemajuan kerangka kerja Custom, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di Cross Border Checkpoints (PPLB);
- 2) mendorong peningkatan pengembangan keuangan lokal di zona pinggiran;

- 3) meningkatkan kualitas SDM di zona pinggiran; Dan
- 4) semakin cepat penguatan batas kelembagaan kemajuan zona pinggiran.

Keempat strategi pusat tersebut kemudian diaktualisasikan melalui setting need area (lokpri) di zona pinggiran. Meskipun demikian, tidak semua wilayah pinggiran diubah menjadi bar secara bersamaan. Ini diidentifikasi dengan kemampuan anggaran terbatas administrasi. Untuk tahun 2012, rencana belanja pondasi jalan, bantuan pemerintah, dan kesejahteraan di wilayah pinggiran ditambah hingga Rp 2,843 triliun. Aset tersebut tersebar di 18 layanan dan yayasan non-pastoral bangsa lainnya yang difasilitasi oleh BNPP. Sejujurnya, ada 111 sub-lokal yang berada dalam klasifikasi wilayah pinggiran di 38 daerah/masyarakat perkotaan di 12 wilayah. Dengan demikian, untuk tahun 2012, BNPP memetik 28 lokpri yang terkelupas pada tahun ini.

Sebagai metodologi ketiga, iklim adalah metodologi yang baru-baru ini dikenal dengan metodologi masa lalu, terutama pendekatan bantuan pemerintah. Metodologi ini terlihat menjaga kepeliharaan ekologis dan membatasi efek yang akan dilakukan latihan kemajuan di zona pinggiran yang merupakan jalan masuk ke keuangan dan bertukar latihan dengan negara-negara tetangga. Meskipun demikian, penggunaan metodologi ini belum benar-benar terlihat. Bahkan, ada kepastian kayu yang dipastikan di hutan di sekitar Suruh Tembawang, pinggiran Indonesia-Malaysia di

Kalimantan Barat. Bagaimana pun, di sepanjang tepi saluran air hingga Suruh Tembawang terdapat banyak kayu sawit.

Satu lagi, fondasi hutan yang diamankan tidak berfokus pada persyaratan dan budaya jaringan terdekat. Bidang bergerak dianggap merugikan bumi, sedangkan visioner bisnis kelapa sawit agak diberikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH).

Secara praktis, ada banyak proyek di wilayah pinggiran yang kadang-kadang menjadi kependekan dari kebutuhan individu di sana. Misalnya di Entikong, rencana kemajuan perkebunan kelapa sawit kemungkinan bertentangan dengan keadaan individu yang bergantung pada peternakan lada sebagai salah satu sumber moneter mendasar. Pada saat itu di Miangas, kerangka kerja yang berbeda membantu memenuhi rumah, aparat desalinasi air, tidak dimanfaatkan sehingga dirugikan tanpa orang lain.

Dengan demikian, sehingga memiliki opsi untuk memperkenalkan pendekatan dan proyek yang sesuai dengan kebutuhan jaringan pinggiran, Pemerintah melalui BNPP harus secara efektif terhubung dengan populasi umum dalam rencana dan dinamis, sehingga pengaturan tidak terlibat dengan keinginan administrasi saja, namun juga mewajibkan keinginan individu. Selain itu, juga penting untuk menyelidiki kemungkinan kemajuan kolaborasi eksekutif. Dengan negara tetangga yang selama ini masih berfokus pada aspek keamanan, dilebarkan ke aspek kesejahteraan dan sosial-budaya. Dengan demikian, kepentingan keamanan, kesejahteraan, dan sosial-budaya kawasan perbatasan akan dapat dipenuhi secara bersama.

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat penulis untuk mempersempit penelitian agar lebih spesifik, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Apakah kendala yang di hadapi dalam pengelolaan kawasan perbatasan ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam kawasan perbatasan.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan penulis rumuskan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan pembaca lain tentang pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia
2. Untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian lebih dalam melakukan pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia
3. Untuk menyusun skripsi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum.